

**IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
BNNP JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

BAGUS ADI WIJAYA
0971010065

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “ VETERAN “ JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BNNP JAWA TIMUR**

Oleh :

BAGUS ADI WIJAYA
NPM.0971010065

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 26 Juli 2014

PEMBIMBING

TIM PENGUJI :

1.

MAS ANIENDA TF.SH.,MH
NPT. 377 070 902 23

Dr. H. SUTRISNO., SH., M.HUM.
NIP. 19601212 19803 1001

2.

SUBANI.,SH.,M.Si
NIP. 19510504 198303 1001

3.

FAUZUL ALIWARMAN., SH., M.HUM
NPT. 38202 07 0221

Mengetahui,
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM.
NIP. 1960625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BNNP JAWA TIMUR**

Oleh :

BAGUS ADI WIJAYA
NPM.0971010065

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Menyetujui,
PEMBIMBING

MAS ANIENDA TF.SH.,MH
NPT. 377 070 902 23

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM.
NIP. 1960625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BNNP JAWA TIMUR

Oleh :

BAGUS ADI WIJAYA
NPM.0971010065

Telah diterima dan direvisi oleh Tim penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 15 Agustus 2014

PEMBIMBING

PENGUJI

1.

MAS ANIENDA TF.SH.,MH
NPT. 377 070 902 23

Dr. H. SUTRISNO., SH., M.HUM.
NIP. 19601212 198803 1 001

2.

SUBANI., SH., M.Si.
NIP. 19510504198303 1001

3.

FAUZUL ALIWARMAN., SH., M.HUM.
NPT.3 8202 07 0221

Mengetahui,
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM.
NIP. 1960625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bagus Adi Wijaya
NPM : 0971010065
Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan , 03 Juli 1991
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Villa Taman Telaga Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: **"IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BNNP JAWA TIMUR"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat dengan ketentuan yang berlaku bukan hasil jiplakan (Plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (Plagiat) maka saya bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaannya (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
Pembimbing

Surabaya, 17 Juli 2014
Penulis,

Materai Rp. 6.000,-

MAS ANIENDA TF,SH.,MH
NPT. 37709 07 0223

BAGUS ADI WIJAYA
NPM. 0971010065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAKSI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan	8
1.5.1 Penyelidikan	10
1.5.2 Penyidikan	27
1.6 Tinjauan Umum Narkotika	32
1.6.1 Narkotika	32
1.6.2 Jenis-jenis Narkotika	34
1.7 Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika	42
1.7.1 Pengertian Tindak Pidana	42
1.7.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	43
1.7.3 Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	48
1.7.4 Dampak Penyalahgunaan Narkotika	57

1.8	Gambaran Umum dan Sejarah BNN	59
1.8.1	Kedudukan BNN, BNP dan BNK	63
1.8.2	Tugas dan Wewenang BNN	64
1.9	Metode Penelitian.....	65
BAB II	DASAR KEWENANGAN BNNP JAWA TIMUR SEBAGAI PENYELIDIK DAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
2.1	Dasar Hukum BNNP Jawa Timur Sebagai Penyelidik Dan Penyidik Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ...	72
2.2	Satker BNNP Jawa Timur yang Khusus menangani tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	78
BAB III	PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BNNP JAWA TIMUR	83
3.1	Prosedur Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh BNNP Jawa Timur	83
3.2	Analisis Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika BNNP Jawa Timur	102
BAB IV	PENUTUP	107
4.1	Kesimpulan	107
4.2	Saran	109
	DAFTAR PUSTAKA	110
	LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpah rahmat dan karunia, sehingga penulisan dapat menyelesaikan Skripsi ini. Disini penyusun mengambil judul **“IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKAOLEH BNNP JAWA TIMUR”**

Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Penulisan ini juga dimaksudkan sebagai wahana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Di samping itu juga diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, SH, MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr, H. Sutrisno, SH, M.Hum selaku Wadek I Fakultas Hukum.
3. Bapak Drs. Sigit Dwi Nugroho, M.Si, selaku Wadek II Fakultas Hukum.
4. Bapak Subani, SH., MS, Selaku Kaprogdi Ilmu Hukum.

5. Ibu Mas Anienda Tien, SH., M.Hum. selaku pembimbing saya serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Pimpinan dan Seluruh Staff Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya yang telah membantu penyusun dalam skripsi.
7. Mama, Papa serta Keluarga yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak serta Keluarga yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum UPN JATIM khususnya dan Teman-teman yang lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu..

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaanya.

Surabaya, 12 Mei 2014

Penulis

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Bagus Adi Wijaya
NPM : 0971010065
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan 3 Juli 1991
Program Studi : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BNNP JAWA TIMUR**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan BNNP Jawa Timur sebagai penyelidik dan penyidikan tindak pidana penyalagunaan narkotika di wilayah hukum provinsi Jawa Timur dan Untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di BNNP Jawa Timur dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan mengurangi jumlah pengguna atau pengedar narkotika di Jawa Timur. Penelitian ini yuridis normatif. Sumber data Primer dan skunder. Analisa data menggunakan analisis deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi. Hasil penelitian di simpulkan bahwa kewenangan BNNP untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan prekursor narkotika serta dalam peraturan kepala BNN no 4 tahun 2010 tentang lembaga BNNP dan BNNK yang menjelaskan bahwa bidang pemberantas yang menaganani penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah provinsi dan kota. Dan serta dapat di simpulkan bahwa penyelidikan dan penyidikan yang di lakukan oleh BNNP Jawa timur secara teknis hampir sama dengan teknik yang di gunakan oleh kepolisian. Dalam melakukan penyidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh BNNP Jawa timur banyak hambatan yang terjadi di lapangan hambatan tersebut di pengaruhi oleh faktor sarana dan prasaran, faktor sumber daya manusia, faktor biaya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan menggunakan teknik pembelian narkotika guna untuk memancing bandar, sindikat dan pengguna narkotika keluar. Hal ini yang mempengaruhi kurang efektifnya penyelidikan dan penyidikan yang di lakukan oleh BNNP Jawa timur.

Kata Kunci : Penyelidikan, Penyidikan, Tindak Pidana Narkotika

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba skala internasional telah diadakan berbagai konvensi internasional, antara lain bertujuan untuk menerapkan sanksi dan asas hukum pidana yang seragam. Dalam hal ini Indonesia telah mengeluarkan serangkaian perundang-undangan, Keputusan Presiden, Intruksi Presiden, antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.
3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (P4GN).

Perhatian pemerintah terhadap penyalahgunaan dan kasus narkoba sangat serius, bentuk keseriusan pemerintah adalah dengan membentuk lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan tugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba serta visinya mewujudkan Indonesia Bebas Dari Ancaman Narkoba 2015. Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1999, tugas BNN pada awalnya adalah mengkoordinasi, dan sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 sekarang berwenang langsung menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta pengedaran narkoba, dan lembaga yang ada seperti POLRI diberdayakan dengan menambah struktur organisasi

dan satuan tugas khusus. Masyarakat juga tidak ketinggalan dengan membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Berdasarkan hal tersebut, lembaga BNN diharapkan dapat terbentuk sampai pada tingkat kabupaten berupa BNN Propinsi dan BNN Kabupaten/Kota. Kota Surabaya yang berada di Propinsi Jawa Timur juga tidak luput dari oknum penyalahgunaan narkoba. Bahkan tidak tanggung-tanggung mulai tingkat pelajar sekolah menengah lanjutan pertama sampai tingkat mahasiswa dan bahkan orang tua baik itu pria maupun wanita, dari kalangan bawah, menengah, kalangan elit, pejabat bahkan aparatur negara, Kepolisian dan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) turut menjadi sasaran narkoba. Mereka ada yang menjadi pengedar sekaligus penyalahguna narkoba sampai kepada hanya pengguna saja.

Hal ini turut menjadi perhatian pemerintah, hingga akhirnya membentuk Lembaga Badan Narkotika Nasional tingkat Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas yang diemban BNN yaitu, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba (P4GN) sesuai dengan intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011.

Berikut ini adalah data analisis perkembangan dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Jawa Timur pada tahun 2012 oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.

Dibawah ini adalah data penangkapan BNNP Jawa Timur :

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI JAWA TIMUR**

**TABEL 1.1
LAPORAN TAHUNAN PENYIDIKAN PERKARA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
TANGGAL 1 JANUARI 2012 S/d TANGGAL DESEMBER 2012**

Identitas Tersangka				Umur	Pasal	Barang Bukti Non Narkotika (Asset)	No dan Tgl SP Han dan Lama Masa Tahanan	Keterangan
Nama	TTL	Kewarganegaraan	Alamat					
moch. Yusuf	Madiun 27 September 1975 (L)	Indonesia	Jl.Citaro Gang 1 No.23 Gg.02 madiun	36 Thn	114 ayat (1), 112 ayat (2), jo 132 dan pasal 137 UU No.35 Tahun 2009	1 (satu) Handphone Merk Nokia Type 1208 dengan nomor telepon 087753927638	Sp.Han/52-SIN/VII/2012 /BNN, 2 JULI 2012, 20 Hari	Barang bukti 201.40 gram
Yohanes andrean	Surabaya 12 Desember 1956 (L)	Indonesia	idem	56 Thn	132, 114 ayat (2), 137 ayat (2), dan atau 131 UU No.35 Tahun 2009	1 (satu) Handphone dengan nomer 0812349456565	Sp.Han/51-SIN/VII/2012 /BNN, 2 Juli 2012, 20 hari	Barang bukti 387.1 gram
Teuku Bin M.tahrir	Aceh 28 Juli 1979 (L)	Indonesia	Jl.teuku umar F/11 RT.33/12 aceh	40 Thn	132 ayat (1) jo 114 ayat (2), 112 ayat (2) 137 UU No.35 Tahun 2009	data rekening transaksi penjualan narkotika aditya kristian No rek.0183456986 budiono no rek. 2890650981	Sp.Han/55-SIN/VII/2012 /BNN, 4 JULI 2012, 20 hari	-
Aditya Kristyan	mojokerto 16 juni 1984 (L)	Indonesia	perum puri indah blok DE sidoarjo	28 Thn	114 ayat (1), 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009	1 rumah puri indah blok DE no 12 sidoarjo 1 unit kendaraan daihatsu xenia nopol w1440 pr	Sp.Han/01-BRTS/VIII/2012/BNNP, 30 agustus 2012, 20 hari	-

Sumber data dari BNNP Jawa Timur

**SURABAYA , 22DESEMBER2012
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI JAWA TIMUR**

Drs. IWAN A. IBRAHIM

Berikut ini adalah data penangkapan gabungan antara BNNP Jawa Timur dan Kepolisian Jawa Timur dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, narkotika :

Tabel 1.2
Daftar rangking ungkap kasus narkotika triwulan I (Bulan Januari, Februari, Maret) tahun 2012

No	Kesatuan	Jumlah Kasus	Urutan Rangking
1	2	3	4
1.	Polrestabes Surabaya	172	I
2.	Polda Jatim	74	II
3.	Polres Kediri	45	III
4.	Polres Sidoarjo	36	IV
5.	Polres Tulungagung	34	V
6.	Polres Jombang	31	VI
7.	Polres Banyuwangi	26	VII
8.	Polres Tanjungperak	23	VIII
9.	Polres Malang Kota	23	VIII
10.	Polres Nganjuk	23	VIII
11.	Polres Kediri Kota	22	IX
12.	Polres Malang	20	X
13.	Polres Jember	18	XI
14.	Polres Probolinggo kota	17	XII
15.	Polres Tuban	14	XIII
16.	Polres Blitar Kota	12	XIV
17.	Polres Bangkalan	11	XV

No	Kesatuan	Jumlah Kasus	Urutan Rangkaing
18	Polres Madiun kota	9	XVIII
19	Polres Mojokerto Kota	6	XIX
20	Polres Bojonegoro	3	XX

Sumber : Laporan Triwulan I Tahun 2012 BNNP Jawa Timur

Tabel 1.3
Jumlah tersangka penyalahgunaan narkotika berdasarkan kelompok umur
Triwulan I (Januari, Februari, Maret) 2012.

No	Umur	(Januari, Februari, Maret) Tahun 2012
1.	< 14 th	1
2.	15-19 th	101
3.	20-24	204
4.	25-64	678

Sumber : Triwulan I 2012, BNNP Jawa Timur

Tabel 1.4
Data Jumlah nara pidana dan tahanan narkotika di Lapas / Rutan Sejava
Timur periode Triwulan I tahun 2012.

No.	UPT	Jumlah Penghuni Narkotika TW I Th 2012						Total
		Narapidana		Tahanan		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	
1.	LAPAS KLAS I Surabaya	808	0	1	0	809	0	809
2.	LAPAS KLAS I Malang	379	0	71	0	450	0	450
3.	LAPAS KLAS I Madiun	793	8	23	2	816	10	826
4.	LAPAS KLAS II A Jember	31	0	8	1	39	1	40
5.	LAPAS KLAS II A Pamekasan	525	1	9	0	534	1	535
6.	LAPAS KLAS II A Kediri	111	0	52	1	163	1	164
7.	LAPAS KLAS II A Wanita Malang	0	236	0	2	0	238	238
8.	LAPAS KLAS II A anak Blitar	21	0	0	0	21	0	21
9.	LAPAS KLAS II A Bojonegoro	2	1	2	0	4	1	5
10.	LAPAS KLAS II A Sidoarjo	175	0	36	1	211	1	212
11.	LAPAS KLAS II B Ngawi	2	0	2	0	4	0	4
12.	LAPAS KLAS B Blitar	4	0	7	0	11	0	11
13.	LAPAS KLAS II B Tulungagung	1	0	9	1	10	1	11
14.	LAPAS KLAS II B Lamongan	14	1	6	0	20	1	21
15.	LAPAS KLAS II B Tuban	2	0	2	0	4	0	4
16.	LAPAS KLAS II B Mojokerto	31	1	11	1	42	2	44
17.	LAPAS KLAS II B Jombang	26	1	38	1	64	2	66
18.	LAPAS KLAS II B Pasuruan	12	0	8	0	20	0	20
19.	LAPAS KLAS II B Probolinggo	124	0	0	0	124	0	124
20.	LAPAS KLAS II B Lumajang	48	0	3	0	51	0	51

No.	UPT	Jumlah Penghuni Narkotika TW I Th 2012						Total
		Narapidana		Tahanan		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	
21.	LAPAS KLAS II B Bondowoso	31	2	7	1	38	3	41
22.	LAPAS KLAS II B Banyuwangi	51	13	60	5	111	18	129
23.	RUTAN KLAS I Surabaya	63	4	500	42	563	46	609
24.	RUTAN KLAS II B Gresik	27	0	9	0	36	0	36
25.	RUTAN KLAS II B Bangil	19	1	39	3	58	4	62
26.	RUTAN KLAS II B Kraksan	5	1	10	3	15	4	19
27.	RUTAN KLAS II B Situbondo	2	1	4	2	6	3	9
28.	RUTAN KLAS II B Nganjuk	1	0	4	0	5	0	5
29.	RUTAN KLAS II B Trenggalek	2	0	0	0	2	0	2
30.	RUTAN KLAS II B Magetan	1	0	1	0	2	0	2
31.	RUTAN KLAS II B Ponorogo	0	0	0	0	0	0	0
32.	RUTAN KLAS II B Pacitan	11	1	2	0	13	1	14
33.	RUTAN KLAS II B Bangkalan	12	0	10	0	22	0	22
34.	RUTAN KLAS II B Sampang	1	0	0	0	1	0	1
35.	RUTAN KLAS II B Sumenep	3	1	9	1	12	2	14
36.	CAB. RUTAN ARJASA	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL		3338	273	943	67	4281	340	4621

Sumber :BNNP Jawa Timur TW. I tahun 2012.

Tabel 1.5

Jumlah tersangka penyalahgunaan narkotika berdasarkan pekerjaan Triwulan I (Januari, Februari, Maret) 2012

No	Status Pekerjaan	Jumlah Penyalahgunaan Narkoba
1	2	3
1.	Pelajar	35
2.	Mahasiswa	13
3.	Swasta	663
4.	Buruh / Karyawan	49
5.	Petani / nelayan	27
6.	Pedagang	25
7.	Wiraswasta / pengusaha	71
8.	Sopir / tukang ojek	36
9.	Ibu rumah tangga	6
10.	Tidak kerja	47
11.	TNI	3
12.	POLRI	6
13.	PNS	2
Jumlah		983

Sumber : Triwulan I 2012, BNNP Jawa Timur

Sebagai lembaga pemerintah, non pemerintah non kementrian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui kepala kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 Pasal 70 BNN berwenang melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap narkoba serta Prekursor Narkotika.

Oleh karena itu, Penulis merasa perlu mengetahui peran serta kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, hingga Penulis memilih judul dalam skripsi ini **“IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BNNP JAWA TIMUR”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah dasar kewenangan BNNP Jawa Timur sebagai penyelidik dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?
2. Bagaimana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan BNNP Jawa Timur sebagai penyelidik dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum provinsi Jawa Timur.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di BNNP Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Di harapkan dapat berguna bagi praktisi hukum untuk mengetahui peraturan – peraturan hukum apa saja yang dapat menjerat para pelaku penyalahgunaan narkotika. Hal ini merupakan sebagai konsekuensi logis dari perkembangan hukum yang akan berdampak pada terjadinya proses perubahan sosial yang akselerasinya dari waktu ke waktu semakin cepat dan berkembang.

2. Secara Praktis

Di harapkan para Aparat Penegak hukum khususnya BNNP Jawa Timur yang akan langsung bersentuhan dengan para pelaku penyalahgunaan narkotika dapat menanggulangi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena di masa yang akan datang perkembangan tersebut akan lebih memotivasi para criminal untuk menciptakan modus baru terhadap perbuatan tindak pidana yang sebelumnya belum pernah di kenal.

1.5 Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan dan penyidikan merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai aparat penyelidik dan aparat penyidik serta aparat lainnya dalam hal

ini adalah PPNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut.

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.¹

Selain itu yang dimaksud Penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP sebagai berikut.

Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Tujuan mencantumkan kedua pasal di atas adalah agar dapat mengukur dan memahami hal ihwal proses penegakan hukum dari awal dengan benar, yaitu dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Setelah memahami permasalahan ini, diharapkan kesalahan-kesalahan yang berakibat kepada kerugian akibat kesewenang-wenangan aparatur negara penegak hukum dapat diminimalisir, atau dapat dihindarkan. Keadaan ini didasarkan kepada fakta-fakta bahwa kesalahan, kesewenang-wenangan itu masih sering kita jumpai dalam proses penegakan hukum di Indonesia, utamanya pada tingkat penegak hukum di tingkat atau lini terdepan, walaupun juga tidak menutup kemungkinan lini-lini lainnya. Hukum harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, hukum tidak perlu lagi menjadi "monopoli" bagi sarjana-sarjana hukum,

¹Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 17

setidak-tidaknya masyarakat Indonesia harus memulai dengan sikap disiplin karena kebutuhan berhukum (penghargaan dan penghormatan kepada pihak lain), maupun disiplin karena adanya etika kehidupan. Apabila demikian, maka masyarakat Indonesia sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sadar hukum. Berhukum hendaknya dipahami sebagai kebutuhan bangsa Indonesia, berhukum tidaklah sama dengan hidup berundang-undang *unsich*, atau hidup berdisiplin secara kaku. Karena pada dasarnya berhukum itu adalah sebuah kesadaran yang muncul dari dalam diri setiap manusia, sedangkan berundang-undang itu kesadarannya karena adanya faktor pengaruh maupun tekanan dari luar dirinya.

1.5.1 Penyelidikan

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Adapun penyelidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah sebagai berikut.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²

Jadi, menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP di atas, penyelidikan adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana atau bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Penulis sengaja menuliskan kata-kata pelanggaran hukum, bukan pelanggaran peraturan perundang-undangan pidana, karena antara hukum dengan peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah, hukum merupakan cara pandang seseorang terhadap cara pencapaian keteraturan dan penghormatan, cara pandang ini masih merupakan ide yang murni karena dilandasai oleh kebutuhan, ide itu diartikan bahwa disitulah hukum yang sebenarnya, atau inti dari hukum itu, sedangkan undang-undang adalah sebuah reduksi dari cara pandang seseorang terhadap keteraturan dan penghormatan yang diwujudkan dengan "kesepakatan", yang dituangkan dalam teks yang ada unsur kepentingan dan pemaksaan. Sangat jelaslah bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan tugas kepada aparaturnya di bidang penegakan hukum untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalui laporan, pengaduan, atau karena diketahui sendiri oleh karena kewajibannya. Upaya itu adalah upaya untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu memenuhi syarat dan masuk dalam kategori peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pi-

²*Ibid.* hal. 18

dana. Peristiwa itu merupakan peristiwa pidana apabila sesuai dengan persyaratan pasal-pasal dalam KUHP atau dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat di luar KUHP. Perlu diperhatikan kadang-kadang peristiwa itu hampir mirip sebagaimana ditentukan dalam KUHP, tetapi urutan peristiwanya ternyata suatu peristiwa yang telah dibuat kesepakatan sebelumnya dalam peristiwa yang tidak melanggar hukum dan etika, maka harus diperhatikan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa perdata. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam perkara pidana tidak boleh terlibat secara formal dalam perkara ini, meskipun hal ini masih saja sering terjadi, yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Ketidak mengertian aparat penegak hukum itu terhadap ketentuan hukum itu sendiri, atau bisa jadi aparat penegak hukum itu ada kepentingan tersendiri secara personal terhadap perkara ini yang nyata-nyata melanggar hukum.

Pengertian penyelidikan, terutama yang dilakukan oleh aparatur negara di bidang penegakan hukum pidana, baik ketentuan hukum pidana yang diatur di dalam KUHP maupun ketentuan hukum pidana yang diatur di luar KUHP. Mengapa penyelidikan ini perlu dibahas, adalah semata-mata agar kesalahan-kesalahan dalam tugas penyelidikan ini dapat diminimalisir bagi kepentingan aparatur negara itu sendiri, maupun bagi kepentingan masyarakat umum, agar pemahaman batasan-batasan tindakan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dapat mengerti dengan baik. Penyelidikan terhadap perkara pidana itu

antara lain dilakukan dengan cara mencari keterangan di lapangan tentang apa kata orang terhadap peristiwa hukum yang dimasalahkan, bisa juga dilakukan secara langsung di tempat yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran hukum, dan bisa juga dengan cara melakukan *cross cek* atas dugaan perkara itu dengan berbagai peraturan yang terkait, misalnya peraturan yang bersifat administratif yang menjadi kewenangan birokrasi atau kewenangan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Misalnya di bidang perizinan, dengan keluarnya perizinan oleh pemerintahan kepada badan hukum tertentu, apakah keluarnya perizinan itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau juga dengan keluarnya perizinan itu telah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.³

Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan pengertian tentang penyelidikan, yaitu yang berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan tindak atau peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterpenuhan adanya peristiwa pidana itu antara lain dapat diukur sebagai berikut.

a. Adanya Laporan dan/atau Pengaduan tentang Dugaan Peristiwa Pidana kepada Aparatur Negara Penegak Hukum

³*Ibid.* hal. 19

Untuk mengetahui tentang dugaan peristiwa pidana, dapat diidentifikasi melalui adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat, baik melalui korban secara langsung maupun melalui pihak lain yang datang kepada aparaturnegara penegak hukum dalam perkara pidana, maupun diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum. Kemudian kewajiban dari penegak hukum itu harus membuat laporan atau catatan dalam register laporan atau perkara yang dilaporkan maupun yang didapati sendiri oleh aparat penegak hukum itu. Timbul pertanyaan mengapa laporan atau pengaduan maupun peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana itu, harus dibuat catatan dalam register perkara yang memuat nomor register perkara? Kepentingannya adalah agar semua tindakan hukum yang akan dilakukan mempunyai dasar hukum atau kekuatan hukum yang jelas, kekuatan hukum yang jelas itu terletak pada peristiwa yang secara spesifik telah terjadi. Nomor register perkara itu adalah nomor register yang diperlukan sebagai identifikasi dugaan peristiwa pidana. Identifikasi akan berimplikasi kepada fokusnya dugaan peristiwa pidana yang terjadi, dan menimbulkan kewenangan-kewenangan yang dijamin oleh undang-undang untuk dilakukan tindakan-tindakan hukum tertentu oleh penyidik. Implikasi itu antara lain munculnya surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan, dan kewenangan lainnya berupa kewenangan kepada aparaturnegara untuk melakukan pemanggilan kepada saksi-saksi

guna dimintai keterangan untuk menentukan apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan " merupakan peristiwa pidana. Dengan penomoran itulah pokok perkara atau persoalan dapat difokuskan.⁴

b. Adanya Dugaan Peristiwa Pidana yang Terjadi pada Waktu atau Saat yang Mudah Dipahami oleh Akal Sehat (Waktu Tertentu)

Dalam bahasa hukum, waktu kejadian dikenal juga dengan sebutan *tempus delicty* yang berarti untuk menerangkan waktu peristiwa pidana itu terjadi. Kepentingan kejelasan waktu tertentu dalam peristiwa dugaan tindak atau perkara pidana adalah untuk memberikan pemahaman yang masuk akal, kapan dugaan peristiwa pidana itu terjadi. Waktu tertentu itu tidak harus waktu yang pasti dalam hitungan jam, menit, dan detik, tetapi dapat pula waktu tertentu itu terjadi pada bulan dan tahun tertentu. Menggunakan bulan dan tahun tertentu ini dapat disebabkan karena waktu tepatnya kejadian sudah lupa. Kepentingan lain dari keterangan waktu itu adalah untuk menentukan apakah peristiwa pidana itu sudah atau belum daluwarsa untuk dilakukan proses hukumnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

c. Adanya Pihak-Pihak Tertentu yang Merasa Dirugikan atas Dugaan Peristiwa Pidana Itu

⁴ *Ibid.* hal 21

⁵ *Ibid.* hal. 22

Kerugian dalam perkara ini adalah kunci untuk menentukan peristiwa hukum itu, apakah peristiwa hukum itu benar atau tidak benar adanya. Banyak orang memahami secara keliru dalam konteks kerugian ini, kerugian akan memberikan makna tentang arah kerugian itu. Kata atau peristiwa yang menimbulkan kerugian harus betul-betul diwaspadai dan dimengerti oleh semua pihak bukan saja oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh aparaturnegara penegak hukum pidana. Dengan pengertian yang benar akan peristiwa ini, akan mampu memberikan gambaran apakah peristiwa itu peristiwa pidana, atau peristiwa itu masuk dalam kelompok atau ranah peristiwa perdata. Bagaimana cara mengidentifikasi kerugian itu masuk dalam peristiwa pidana atau dalam peristiwa perdata dapat diidentifikasi melalui langkah-langkah sebagai berikut.

1) Kerugian yang Masuk dalam Peristiwa Pidana

Kerugian yang terjadi yang dapat saja bersifat materiil dan non materiil (kebendaan dan bukan kebendaan). Kerugian materiil misalnya kerugian dengan ukuran sejumlah uang, dapat berupa kerusakan barang, atau sesuatu yang dapat diukur dengan nilai nominal. Dengan catatan bahwa kerugian yang timbul ini bukan suatu risiko yang telah diperjanjikan atau diperhitungkan sebelumnya, atau dengan kata lain kerugian itu akibat adanya tindakan curang oleh pihak lain, atau risiko kerugian itu terjadi karena iktikad buruk salah satu pihak yang merugikan pihak lain,

atau dengan kata lain timbulnya kerugian yang bersifat materiil atau yang dapat bersifat finansial itu terjadinya secara sembunyi-sembunyi.⁶

2) *Kerugian yang Masuk dalam Peristiwa Perdata*

Berbeda dengan kerugian yang masuk dalam ranah (wilayah) pidana, kerugian yang masuk dalam ranah perdata adalah kerugian yang hanya bersifat kebendaan (materiil). Kerugian ini didahului atau masih ada kaitannya dengan hal-hal yang telah diperjanjikan atau setidaknya diketahui atau diperjanjikan sebelumnya, atau kerugian ini akibat dari suatu peristiwa perikatan atau kesepakatan, yang dapat saja berbentuk kerja sama, yang biasanya berupa perjanjian usaha atau kerja sama dalam suatu bidang usaha yang tidak bertentangan dengan etika, hukum dan peraturan, serta bersifat halal. Kerugian ini sebelumnya telah diperkirakan akan terjadi, termasuk solusi atas kerugian itu telah disepakati cara menyelesaikannya, ciri lainnya adalah akibat kerugian yang bersifat materiil ini menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya atau diperjanjikan sebelumnya. Kemudian timbul pertanyaan bentuk perjanjian yang bagaimana yang diakui oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia? Secara singkat perjanjian ini dapat berbentuk tertulis dan tidak tertulis, secara detailnya dapat

⁶ *Ibid.* hal. 23

dilihat dalam KUH Perdata yang berlaku di Indonesia yakni dalam Pasal 1239 yang berbunyi sebagai berikut.

Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.

Selanjutnya, apa konsekuensinya terhadap aparaturnya negara bidang penyidikan (pidana), karena kerugian dalam perkara ini telah nyata dan jelas adalah dalam ranah (wilayah) perdata, maka aparaturnya negara (penyidik, dan Jaksa) tidak dapat dibenarkan masuk dalam ranah ini secara formal, apabila memaksakan diri maka peristiwa ini adalah peristiwa penyalahgunaan kewenangan yang dapat berisiko hukum selanjutnya secara personal.

d. Adanya Tempat atau Lokasi Kejadian yang Jelas dan Pasti atas Dugaan Peristiwa Pidana Itu

Dalam bahasa hukum terutama hukum pidana tempat kejadian perkara sering dikenal dengan istilah *locus delicty*, yaitu istilah yang menjelaskan hal ihwal tentang tempat terjadinya dugaan peristiwa pidana itu. Hal ini penting berkaitan dengan wilayah kewenangan (*yurisdiksi*) untuk menangani peristiwa pidana. Yurisdiksi itu menyangkut yurisdiksi Polri selaku penyidik untuk menangani peristiwa pidana, yurisdiksi kejaksaan, yaitu kewenangan institusi kejaksaan selaku penuntut umum untuk menangani atau melakukan penuntutan atas perkara pidana peristiwa itu, termasuk pula yurisdiksi pengadilan untuk mengadili perkara

pidananya, yurisdiksi ini didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya yurisdiksi Polres biasanya diukur dari wilayah kabupaten, yurisdiksi ini juga pada umumnya berlaku bagi kejaksaan, dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi dapat juga berlaku pengecualian yang tersendiri. Misalnya di wilayah kotamadya bisa jadi Polresnya dapat terdiri atas lebih dari dua wilayah Polres, sedangkan untuk yurisdiksi kejaksaan dan yurisdiksi Pengadilan Negerinya tetap satu.⁷

A. Jenis-Jenis Tindakan dalam Penyelidikan

Untuk mengetahui pada tahap awal, apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana, harus terlebih dahulu dilakukan tindakan hukum yang berupa penyelidikan. Penyelidikan yang dapat dilakukan antara lain dapat berupa tindakan mendengarkan informasi yang beredar di masyarakat, atau keterangan-keterangan apa saja yang diucapkan atau disampaikan oleh masyarakat tentang peristiwa yang sedang terjadi dan melakukan pengecekan secara langsung terhadap objek yang diduga ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Tindakan-tindakan itu dimaksudkan untuk mensinkronkan dengan aturan hukum mana yang cocok dengan peristiwa itu.⁸

⁷*Ibid.* hal. 25.

⁸*Ibid.* hal. 26

Proses penyelidikan dinamakan dengan tindakan hukum karena dalam penyelidikan itu terdapat tindakan-tindakan yang ditujukan untuk pengungkapan peristiwa hukumnya, yang ditandai dengan adanya surat perintah dari penyidik yang di dalamnya juga terdapat kewenangan yang harus dihormati oleh setiap orang. Dalam penyelidikan, untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana, antara lain dengan cara sebagai berikut.

1. Menentukan Siapa Pelapor atau Pengadunya

Untuk menentukan siapa pelapor atau pengadu dalam perkara pidana biasanya relatif tidak mengalami kesulitan, karena pelapor atau pengadu akan datang ke kantor polisi untuk melaporkan atau mengadukan peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana. Pengaduan yang sudah dilakukan itu adalah bagian dari yang menyebabkan hukum sudah mulai dapat dioperasikan.

2. Menentukan Peristiwa Apa yang Dilaporkan

Untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran hukum tertentu, perlu dilakukan upaya penyelidikan, artinya upaya atau tindakan penyelidikan itu untuk mengumpulkan keterangan tertentu dari berbagai pihak yang dianggap mengerti karena melihat, mendengarkan, dan mengerti secara langsung peristiwa itu. Mengerti dapat diartikan bahwa

seseorang itu dianggap mengetahui karena ia adalah yang menangani bidang pekerjaan itu.⁹

Apabila sudah terkumpul cukup keterangan sebagai alat bukti yang diduga kuat terkait dengan peristiwa hukum itu, kemudian dilakukan upaya mencari landasan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan tentang kepidanaan. Landasan hukum atau dapat juga dikatakan sebagai landasan peraturan perundang-undangan itu hanya dipakai untuk membuka kunci suatu peristiwa yang dianggap merupakan peristiwa hukum itu, apakah peristiwa itu sinkron atau cocok dengan ketentuan peraturan pidana tertentu. Apabila peristiwa itu sama dengan kehendak dari peristiwa yang diatur dalam ketentuan pidana, maka proses selanjutnya adalah melakukan tindakan hukum yang berupa penyidikan. Penyidikan itu harus dilakukan secara teliti, cermat, dan akurat, atau dengan kata lain bahwa mindset penyidik harus mampu mengungkap secara sempurna peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana itu. Pedoman sempurna itu antara lain dengan berpedoman kepada waktu-waktu secara berurutan tentang peristiwa-peristiwa itu.

Sebagai contoh tuan A diberi kuasa oleh tuan B untuk mengantarkan dan memberikan barang tertentu kepada tuan C dengan mandat hanya untuk memberikan barang dimaksud kepada

⁹*Ibid*hal. 27

orang yang telah disebutkan, kemudian oleh tuan B barang itu tidak diberikan kepada tuan C, tetapi barang itu dijual kepada tuan D, maka peristiwa ini adalah murni peristiwa pidana. Lain halnya dengan tuan A membuat kesepakatan kerja sama di bidang usaha tertentu, segala sesuatunya telah dibuat kesepakatan secara tertulis, tentang bagaimana permodalan, bagaimana pembagian untung ruginya, bagaimana tanggung jawabnya terhadap risiko kerugian, tentang jangka waktu berlakunya perjanjian itu, bagaimana penyelesaian kalau ada masalah sengketa hukumnya, dan seterusnya, maka peristiwa ini adalah peristiwa perdata.

3. *Di Mana Peristiwa Itu Terjadi*

Tindakan selanjutnya masih dalam rangka penyelidikan terhadap peristiwa hukum itu untuk menentukan tempat perkara itu terjadi (*locus delicty*). Apabila peristiwa yang terjadi seperti kejahatan terhadap jiwa, maka akan sangat mudah menentukannya, sedangkan apabila kejahatan terhadap sifat kebendaan misalnya penipuan, maka agak sedikit perlu kehati-hatian terutama apabila peristiwa itu sudah lama terjadi dan baru dilaporkan, pelapor juga ragu-ragu di mana peristiwa itu terjadi, peristiwa ini yang perlu betul-betul didalami, sehingga didapati kepastian tentang locus delicty-nya.¹⁰

4. *Kapan Peristiwa Itu Terjadi*

¹⁰ *Ibid.* hal. 28

Dalam peristiwa tertentu, waktu kejadian (*tempos delicty*) yang mendekati ketepatan waktunya sangat penting untuk mengungkap peristiwa pelanggaran hukum itu. Ukurannya adalah bahwa peristiwa hukum itu waktu kejadiannya haruslah masuk akal dan mudah dipahami oleh siapa pun. Unsur ini sangatlah penting dalam proses penegakan hukum, karena peristiwa hukum tanpa diketahui kapan waktu peristiwa itu secara jelas, akan sulit untuk dilaksanakan proses penegakan hukumnya.¹¹

5. Menentukan Siapa Pelaku dan Korban atau Pihak yang Dirugikan

Tindakan selanjutnya adalah menentukan atau mengidentifikasi siapa pelaku dan siapa korbannya. Dalam perkara tertentu seperti kasus penipuan, penggelapan, dan pencemaran nama baik, menentukan pelaku tidak banyak mengalami masalah karena biasanya antara pelaku dan korban sudah saling kenal. Namun, dalam perkara lain misalnya perkara pencurian atau perampokan, untuk menentukan siapa pelakunya mengalami kesulitan dikarenakan korban rata-rata tidak mengenal pelakunya. Selain itu, dalam perkara lain karena sifat tertutupnya korban utamanya seperti dalam perkara perkosaan, korban tidak mau mengungkap perkara ini karena takut aibnya akan tersebar, kondisi ini yang mempersulit proses penegakan hukum.

¹¹*Ibid.* hal. 29

Adapun dalam peristiwa lainnya, misalnya dalam peristiwa yang diatur dalam undang-undang psikotropika, untuk mengetahui siapa sebenarnya pelaku dari peristiwa itu, perlu dilakukan pendalaman secara sungguh-sungguh terhadap peristiwa yang sesungguhnya terjadi, tidak ada jaminan yang hanya mendasari kepada didapatnya barang bukti itu menyebabkan yang kedapatan adalah tersangkanya. Hal ini perlu disikapi secara hati-hati karena banyak permainan dalam perkara ini dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, hukum harus diperankan secara baik, agar tidak salah dalam menerapkan stigma negatif terhadap seseorang secara sederhana saja.¹²

6. *Bagaimana Peristiwa Itu Terjadi*

Tugas selanjutnya masih dalam rangka penyelidikan, adalah mencari tahu bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi, artinya dengan cara bagaimana pelaku kejahatan itu melakukan aksinya. Tujuan dari mengumpulkan bahan keterangan ini adalah dalam rangka mencari persesuaian antara perbuatan melawan aturan hukum dengan aturan hukum yang ada. Apabila ada kesesuaian dalam perkara ini secara benar, maka hukum harus mulai digerakkan melalui upaya penyidikan. Persesuaian harus dicermati dengan benar bahwa memang benar terdapat persesuaian antara peristiwa dengan kelakuan yang

¹²*Ibid.* hal. 30

sesungguhnya, bukan semata-mata bahwa antara keadaan yang terjadi itu dibuat bersesuaian dengan peraturan yang ada. Karena hanya secara lahiriah saja sesuai belum tentu peristiwa itu betul-betul merupakan peristiwa pelanggaran hukum, mengingat banyak perilaku oknum yang berwenang mengolah situasi sedemikian, seolah-olah peristiwa itu benar adanya, padahal sesungguhnya peristiwa itu adalah rekayasa saja.¹³

Untuk menentukan bagaimana peristiwa pidana itu terjadi, sudah saatnya aparat penegak hukum untuk berpikir bahwa ia adalah benar-benar aparat penegak hukum, bukan aparat penegak peraturan perundang-undangan, sehingga mulai bergerak untuk berpikir menemukan peristiwa hukum yang sesungguhnya, dengan cara berpikir hukum yang progresiflah peristiwa hukum itu dapat benar-benar diletakkan pada posisi yang sebenarnya. Banyak peristiwa hukum yang mengalami kekacauan posisi, dikarenakan cara pandang dalam penegakan hukum yang sempit. Penegak hukum yang terdiri atas penyidik, penyelidik, dan hakim diberi peluang dan kepercayaan untuk menggali peristiwa itu dari sudut pandang hukum, bukan dari sudut pandang peraturan perundang-undangan. Apabila hukum hanya dikaji dari sudut pandang peraturan perundang-undangan semata, kemungkinan dapat saja penegakan hukum akan salah arah, tetapi apabila

¹³ *Ibid.* hal. 31

penegakan hukum menggunakan pola penegakan progresif, besar kemungkinan hukum dapat didudukkan pada porsinya.

Sudut pandang progresif ini dalam kasus tertentu misalnya dalam kasus pada Pasal 170 KUHP, yaitu tentang kasus kekerasan terhadap orang atau barang akan sangat mungkin bisa diterapkan. Demikian juga penerapannya dalam kasus status kepemilikan akan kebendaan, kasus hukum lingkungan hidup, kasus korupsi, atau kasus-kasus yang melibatkan organisasi atau birokrasi.

B. Lembaga Penyelidik

Lembaga penyelidik adalah lembaga yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan tugas penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana. Kemudian timbul pertanyaan siapa sebenarnya lembaga penyelidik itu, Pasal 1 angka 4 KUHP, berbunyi penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Dengan demikian, menurut KUHP bahwa penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan catatan apabila kejahatan itu diatur dalam KUHP, sedangkan untuk ketentuan lain misalnya dalam kasus korupsi tentu akan berlaku aturan tersendiri. Dalam ranah ini yang perlu menjadi catatan

penting adalah ranah penegakan hukum, bukan ranah penegakan peraturan perundang-undangan.¹⁴

1.5.2 Penyidikan

Dari tema yang kami bahas sebelumnya, penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan Ketentuan Umum pasal 1 point 2 yang berbunyi:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁵

Dari bunyi pasal di atas, menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, sedang dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut.¹⁶

Maka dari itu, tentulah tugas selanjutnya aparat hukum menentukan kepastian perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana berdasarkan undang-undang pidana dengan cara memperoleh

¹⁴*Ibid.* hal. 31

¹⁵ M. Yahya Harahap, S.H. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Ed. 2 Cet.14, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal. 70.

¹⁶*Ibid.* hal. 33

bukti-bukti kuat bahwa pelaku benar-benar melakukannya. Dengan dimualainya penyidikan ditandai secara formal procedural dikeluarkannya surat perintah oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik sekaligus diterimanya laporan atau pengaduan ataupun informasi tentang telah terjadinya perbuatan pidana di lapangan.

A. Petugas Penyidik

Dalam pasal 6 KUHAP, ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik yang melakukan tugas. Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa penyidik terbagi menjadi 2 bagian sesuai dengan syarat-syaratnya yang ditentukan, yaitu:

1. Pejabat Penyidik Polisi

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi Negara. Peraturan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam BAB 2 PP No. 27 Tahun 1983. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam BAB 2 peraturan pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat diperinci sebagai berikut:

a) Pejabat penyidik penuh, syarat-syaratnya:

- Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
- Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua,
- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian R.I.

b) Penyidik Pembantu, syarat-syaratnya:

- Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a),
- Diangkat oleh Kepala R.I. atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil ini diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b. Yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan

undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Berikut kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil:

- a) Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah:
 - Koordinasi penyidik Polri, dan
 - Di bawah pengawasan penyidik Polri.
- b) Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat 1).
- c) Penyidik pegawai negeri tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang di disidiknya (Pasal 107 ayat 2).
- d) Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai, hasil penyidikan harus diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat 3)
- e) Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkannya pada penyidik Polri maka penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat 3).¹⁷

B.Wewenang Penyidik

¹⁷M. Yahya Harahap, *Op.cit.* hal. 77

Mengetahui wewenang pejabat penyidik yang terbagi menjadi pejabat penyidik dan penyidik pembantu, dapat kita lihat dalam aturan Pasal 7 ayat 1. Wewenang kedua pejabat ini semua terperinci secara umum dalam pasal tersebut, yang oleh M. Yahya Harahap dipaparkan sebagai berikut:¹⁸

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
2. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian,
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan saat perkara,
9. Mengadakan penghentian penyidikan,
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C. Tata Cara Pemeriksaan Penyidikan

¹⁸*Ibid.* hal. 118

Dalam pembicaraan tata cara pemeriksaan, permasalahan difokuskan sepanjang hal-hal yang menyangkut persoalan hukum. Masalah teknis pemeriksaan samasekali di luar jangkauan kita, karena masalah teknis pemeriksaan berada dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Sebagaimana diketahui, titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidikan ialah oknum tersangka. Dari dialah akan diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diperlukan akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat diri. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya itulah pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada suatu pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi-saksi atau ahli, demi untuk terangnya dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan kepada tersangka. Namun, sedangkan kepada tersangka harus ditegakkan harkat martabat dan hak-hak asasinya.

1.6 Tinjauan Umum Narkotika

1.6.1 Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Di antaranya jenis-jenis Psikotropika menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika ialah sebagai berikut :¹⁹

a) Narkotika Golongan I

Yaitu jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya seperti: *Papaversomniferum*, *Opium*, *Kokain*, *Ganja*, *Tetrahydrocannabinol*.

b) Narkotika Golongan II

Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya seperti *Morfina*, *Normorfina*, *Petidina*, *Rasemorfan*, *Tilida*.

c) Narkotika Golongan III

¹⁹ UU No 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA

Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, contohnya seperti *Etilmorfina*, *Kodeina*, *Nikokodina*, *Polkodina*, *Propiram*.²⁰

1.6.2 Jenis-jenis Narkotika :

1.6.2.1 Narkotika

Narkotika dibedakan atas zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman.

a. Tanaman

1. Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman *papaver somniferum* tidak terdapat di Indonesia, tetapi diselundupkan ke Indonesia.
2. Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia).
3. Cannabis Sativa atau Marihuana atau Ganja banyak ditanam di Indonesia.

b. Bukan tanaman

1. Semi sintetis : adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium.

Contoh : Heroin, Kodein, Morfin.

²⁰ BNN, *Buku Panduan Sosialisasi P4GN Alat Peraga Narkotika Sintetis*, Jakarta : Agustus 2012, hal 11.

2. Sintetik : diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (*analgesic*) seperti penekan batuk (*antitusif*).

Contoh : Amfetamin, Metadon, Petidin, Deksamfetamin.

1.6.2.2 Narkotika yang sering disalahgunakan

Narkotika yang sering dikonsumsi oleh masyarakat secara salah antara lain :

1. Heroin

Nama : Putauw, PT, bedak, putih, Brown Sugar, Benana, Smaek, Horse, Hammer, SnowWhite Brown.

Asal : *Papaver Somniferum*.

Bentuk : Seperti bedak berwarna putih, rasa pahit, terdapat paket hemat, dijual sebesar ujung kuku/ibu jari dalam kemasan kertas.

Cara Pakai : Dihirup, dihisap, ditelan dan disuntikkan lewat tangan, kaki, leher.

Efek : Mual, mengantuk, cadel, pendiam, mata sayu, muka pucat, tidak konsentrasi, hidung gatal-gatal.

Gejala putus obat :

Sebelum memakai :

- a. Tulang otot sendi terasa nyeri, demam, takut air
- b. Keringat keluar berlebihan
- c. Takut kedinginan, bulu kuduk berdiri
- d. Mata berair, hidung berair
- e. Mual-mual, perut sakit, diare
- f. Tidak suka makan
- g. Tidak bisa bekerja (lemas)

Setelah memakai :

- a. Fly (berkhayal), mata sembab kadang muntah
- b. Jantung berdebar, mata susah bangun

Bahaya :

- a. Hepatitis B, C, AIDS, HIV
- b. Menstruasi terganggu, infertilitas (impotensi)
- c. Abses (jika pakai suntik)
- d. Tubuh kurus, pucat, kurang gizi
- e. Sulit buang air besar
- f. Mudah terserang radang paru, TBC paru, radang hati, empedu, ginjal

2. Kokain

Nama : Charlie, Nosc Candy, Snow, Coke

Asal : Daun (tanaman Erythro – Xylon Coca)

Bentuk : Serbuk putih, kadang dicampur dengan beberapa macam zat berbahaya, disebut “Drug Cocktail”

Efek :

- a. Suhu badan tinggi, denyut jantung bertambah
- b. Mudah marah, agresif dan merusak
- c. Merasa energik dan waspada dan merasa memiliki dunia (arogan).

Gejala putus obat :

- a. Ada keinginan bunuh diri, mual, kejang-kejang

Bahaya :

- a. Paranoid
- b. Menyebabkan perkelahian
- c. Mabuk dan tidak bergairah
- d. Jika dihirup akan menyebabkan mimisan dan sinusitis
- e. Kerusakan jantung jika dicampur rokok
- f. Pemakaian banyak, nafsu sex hilang
- g. Bisa terjadi psikotik atau gila dalam jangka panjang

3. Ganja

Nama : Ganja, cimeng, gelek, daun, rumput, jayus, jum, barang, marihuana, bang bunga, ikat, labang, hijau

Jenis-jenis : Stick, daun atau tembakau, hashish (minyak/lemak ganja)

Bentuk : Daun kering atau dalam bentuk rajangan kering, dimasukkan dalam amplop. Daun basah, runcing berjari-jari ganjil 5, 7, 9 dst.

Cara Pakai : Dilinting seperti rokok, dihisap dan dimakan, minyak ganja bisa dioles pada rokok biasa

Efek :

- a. Jantung berdebar-debar
- b. Tidak bergairah, cepat marah, sensitif
- c. Perasaan tidak tenang, euforia, kurang percaya diri, rasa letih/malas

Gejala putus obat :

- Sebenarnya hanya faktor psikis dan sugesti yang lebih dominan, apabila tidak memakai ganja.

Bahaya :- Untuk pemakaian yang lama akan menjadikan pemakai menjadi linglung.

4. Ekstasi

Nama : Kancing, *XTC*, *Inex*, *Adam*, *Hug-Drug*, *Essence*, *Disco*, *Biscuits*, *Venus*, *Yupie*, *Butterfly*, *Elektrix*, *Gober*, *Beladin*

Bentuk : Pil, serbuk, kapsul.

Cara Pakai : Diminum dengan air atau yang lain

1. Efek :

- a. Banyak berkeringat dingin, nafsu makan kurang
- b. Badan tak terkendali gerakanya (tripping)
- c. Denyut jantung, nadi bertambah
- d. Tekanan darah naik

e. Rasa percaya diri tinggi

f. Keintiman bertambah

Gejala putus obat :

a. Rasa letih, malas

b. Mudah tersinggung, emosi labil

c. Sulit tidur, mimpi buruk jika tidur

d. Depresi, mata kabur

Bahaya :

a. Pemakaian yang lama akan menjadikan pemakai bisa
linglung

b. Merusak syaraf otak

c. Pucat kurang darah

d. Kurus kurang gizi

e. Penyakit Parkinson

5. Shabu – shabu (Methyl – Amphetamin)

Nama : Ubas, SS, Mecin

Bentuk : Bubuk atau Kristal

Jenis : *Gold silver, coconut, crystal, blue ice*, tebu

Cara Pakai : Dibakar di atas kertas timah dan dihisap melalui
alat yang disebut bong

Pemakai bisa diindikasikan : Tidak tenang (cemas),
mudah marah, dapat cepat lelah, mata nanar, tidak
bersemangat, tidak beraktifitas, keringat berlebihan dan

bahu, wajah pucat, lidah warna putih, nafsu makan kurang, susah tidur (2-3 hari), jantung berdebar-debar, banyak omong, percaya diri tinggi.

Efek :

- a. Sebelum memakai gelisah, ngantuk, lemas, tidak bergairah
- b. Jika sudah memakai, agresif, hiperaktif dan percaya diri tinggi

Gejala putus obat :

- a. Mudah marah
- b. Ngantuk
- c. Faktor sugesti yang dominan apabila tidak memakai
- d. Mudah capek
- e. Rasa lebih malas
- f. Malas hidup

Bahaya :

- a. Paranoid (rasa takut berlebihan)
- b. Pemakaian yang lama akan menjadikan pemakai bisa linglung
- c. Merusak syaraf otak
- d. Kanker hati
- e. Terjadinya gejala psikotik (gila)
- f. Tekanan darah tinggi

Bahaya :

- a. Terjadinya perkelahian
- b. Mudah tersinggung dan marah
- c. Lemas, sedih, ingin bunuh diri
- d. Menimbulkan halusinasi dan melakukan tindakan berbahaya
- e. Bola mata bergerak-gerak

Gejala putus obat :

- a. Mual, muntah, lemah, letih
- b. Denyut jantung cepat, banyak berkeringat, tekanan darah naik
- c. Tangan, lidah, kelopak mata gemetar
- d. Cemas, depresi, mudah tersinggung
- e. Gangguan kesadaran

Bahaya :

- a. Kanker hati, cacat pada janin
- b. Perdarahan lambung, radang pankreas
- c. Penyakit otot, pikun

6. Inhalansia dan Solven

Nama : Lem karet, aerosol spray, acetone, gas N₂O₂, pelumas, thinner, terpentine, DDT, pestisida, zat pewarna

Bentuk : Cairan, gas

1. Efek :

- a. Timbul ilusi, halusinasi
- b. Kemampuan persepsi yang salah

Bahaya :

- a. Merasa dirinya bisa terbang, sehingga bisa terjun dari tempat tinggi tanpa mati
- b. Keracunan akut, bisa mati mendadak akibat menghisap inhalansia
- c. Kejang saluran nafas
- d. Keracunan kronis merusak organ tubuh otak, ginjal, paru-paru, jantung, susunan tulang

1.7 Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika

1.7.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak pidana (*strafbaar feit*). Menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

- Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan

ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

- Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “ Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.

1.7.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Obyektif :

- Perbuatan orang
- Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”

Unsur Subyektif

- Orang yang mampu bertanggung jawab
- Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

- Perbuatan (manusia)
- Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)

- Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

- Kelakuan dan akibat
- Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :
- Unsur subyektif atau pribadi

Yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan Pasal tersebut

Unsur Obyektif

Yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam Pasal 164, 165, 531 KUHP

Pasal 164 KUHP : barang siapa mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut Pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187 dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan.

Pasal 531 KUHP : barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam keadaan

bahaya tadi kemudian lalu meninggal dunia. Syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai unsur delik (perbuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan.

Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Misalnya penganiayaan biasa Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (Pasal 351 ayat 2 KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjadi 7 tahun (Pasal 351 ayat 3 KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Unsur melawan hukum

Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Misalnya Pasal 285 KUHP : “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan”.

Tanpa ditambahkan kata melawan hukum setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa harus mencantumkan dalam dakwaannya dan oleh karenanya harus dibuktikan. Apabila tidak

dicantumkan maka apabila perbuatan yang didakwakan dapat dibuktikan maka secara diam-diam unsure itu dianggap ada.

Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

1.7.3. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Undang-Undang no. 35 tahun 2009 tentang Psikotropika narkotika dan zat adiktif lainnya, untuk penyalahgunaan diatur dalam Pasal 127 yang berbunyi :

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun;

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, ²¹Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasimedis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika Narkotika dan Zat Adiktif lainnya, membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

²¹ UU Psikotropika, Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya No. 35 Tahun 2009. hal. 102

3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
4. Sanksi-Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika (berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika)

Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

1. Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
2. Undang-undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Pshychotriphic Suystances 19 88* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotropika, 1988)
3. Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU RI No. 22 tahun 1997.

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

2. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.

3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkotika secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi, atau kecanduan.

Penyalahgunaan narkotika juga berpengaruh pada tubuh dan mental emosional para pemakainya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkotika pada remaja bahkan bisa berakibat lebih fatal, karena dapat menghambat

perkembangan kepribadiannya. Narkotika bahkan dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang wajar bagi seorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengonsumsi narkotika, tapi hal ini belum member angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika.²²

Berdasarkan rumusan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 diatas, penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa tanaman atau barang ditetapkan sebagai narkoba atau bukan setelah melalui uji klinis dan labotarium oleh Depertemen Kesehatan.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

²²BNN, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta 2007, hal 73.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama – sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), dan teknik penyerahan

yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Namun demikian, dalam tataran implementasi, sanksi yang dikenakan tidak sampai pada kategori maksimal. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, kasus yang diproses memang ringan, sehingga hakim memutuskan dengan sanksi yang ringan pula. *Kedua*, tuntutan yang diajukan relatif ringan, atau bahkan pihak hakim sendiri

yang tidak memiliki ketegasan sikap. Sehingga berpengaruh terhadap putusan yang dikeluarkan.

1.7.4 Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Dampak penyalahgunaan Narkotika Bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.²³

1) Dampak Fisik

- Gangguan pada system syaraf (*neurologis*) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi
- Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
- Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penanahan (*abses*), alergi, eksim
- Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru

²³*Ibid.* hal. 40

- Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
- Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron*), serta gangguan fungsi seksual
- Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid)
- Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya
- Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Overdosis bisa menyebabkan kematian.

2) Dampak Psikis

- Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
- Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
- Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri²⁴

²⁴ *Ibid.* hal 53

3) Dampak Sosial

- Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
- Merepotkan dan menjadi beban keluarga
- Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat.

Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (bahasa gaulnya sugest). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarkah, manipulatif, dll.

1.8. Gambaran Umum dan Sejarah BNN

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi

bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden

Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas

dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk MEMISKINKAN para bandar

atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (*Narco Terrorism*) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco for Politic*).

1.8.1 Kedudukan BNN, BNP dan BNK

A. Kedudukan BNN (BADAN NARKOTIKA NASIONAL)

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

BNN mempunyai tugas membantu presiden dalam :

- a. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN; dan
- b. Melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

B. Kedudukan BNP (BADAN NARKOTIKA PROVINSI)

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional BAB I dan II :

Pasal 1 ayat 1 : Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Kedudukan BNK (BADAN NARKOTIKA KOTA)

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional BAB I dan II :

- a. Pasal 35 : BNNK/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP
- b. Pasal 36 : BNNK/Kota terdiri mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

1.8.2 Tugas dan Wewenang BNN

Pada Pasal 70 :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- c. Berkoordinasi dengan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Pada Pasal 71 :

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.²⁵

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam membuat skripsi tersebut adalah penulisan yang menggunakan metode Yuridis Empiris, yaitu penelitian terhadap keefektifitasan hukum (hukum tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat,²⁶ yang kemudian dikaitkan dengan rumusan masalah yang ada agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang logis. Empiris sendiri berasal dari kata empiris yang artinya berdasarkan pengalaman atau empirisme yang artinya adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh berdasarkan pengamatan dan pendapatan dalam praktek dan tidak perlu mempelajari teori karena empiris ini mempelajirinya lewat pengetahuan yang langsung dalam praktek.

Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan aturan dan teori yang berkaitan dengan kasus tindak pidana Narkoba, yang diatur

²⁵ BNN, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta 2007, hal 54

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal. 30.

dengan UU No5 dan No 22 tahun 1997. Serta di dukung juga oleh UU RI No35 tahun 2009 tentang narkoba.

1.9.2 Sumber Data

Dalam penelitian ilmu hukum empiris, sumber utamanya adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukan hanya bahan hukum saja akan tetapi di tambah dengan pendapat para ahli. Penulisan proposal skripsi ini menggunakan sumber data, yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁷
2. Data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer, dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. pada permulaan penelitian belum ada data literatur, pendapat para ahli, data-data dari internet.

2. Bahan Hukum Sekunder.

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

²⁷*Ibid*, hal. 106.

b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

c) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum. Dan bahan data ini harus ada untuk mengakumulasi permasalahan serta memadu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran dengan tepat.

1.9.3 Pengumpulan Bahan atau Data

Pengertian-pengertian tentang kebenaran menurut paham empiris mendasarkan diri atas berbagai segi pengalaman, dan biasanya menunjuk kepada pengalaman inderawi. Paham-paham empiris dalam arti tertentu memandang proposisi bersifat meramalkan (*prediktive*) atau hipotetis, dan memandang kebenaran proposisi sebagai terpenuhinya ramalan-ramalan itu. Hal yang demikian ini menyebabkan kebenaran menjadi pengertian yang bersifat subyektif serta nisbi. Kebenaran menjadi bersifat dinamis serta tidak pasti, dan bukannya bersifat mutlak. Untuk mengkaji suatu bahan atau data yang kita dapat baik dari buku atau pendapat para ahli serta internet sangat berbeda dengan pengumpulan bahan atau data dari ilmu lain, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.²⁸

Untuk mendapatkan data yang obyektif dalam penyusunan ini, maka pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara:

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hal. 18.

1. Studi kepustakaan

Dengan studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data yang bersumber dari literatur - literatur ,buku-buku atau website internet yang ada hubungannya dengan asuransi. Melalui sumber data dari buku, literature dan website internet yang mengenai teori tentang asuransi kiranya dapat sebagai bahan perbandingan.

2. Studi Lapangan

Dengan mengadakan studi lapangan, adapun teknik yang digunakan ialah:

a. Observasi

Dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian yaitu pada BNNP Jawa Timur.

b. Interview atau wawancara.

Sebagai sumber data yang didapat dari hasil wawancara dengan jumlah beberapa orang narasumber di BNNP Jawa Timur. Dengan wawancara ini diharapkan memperoleh data yang lebih mendalam.

1.9.4 Metode Analisis Data

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.

Berdasarkan prosedur pengumpulan bahan hukum yang telah diperoleh, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub

aspek dan hubungannya satu sama lain, ulasan singkat mengenai bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.²⁹ Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis, tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.³⁰

Sampling merupakan salah satu langkah yang penting dalam penelitian, karena sampling menentukan suatu hasil penelitian, dalam arti menentukan seberapa besar atau sejauh mana keberlakuan generalisasi hasil penelitian tersebut,³¹ apabila pencari data (pewawancara atau pengobservasi) telah memperoleh data-data maka berkas catatan informasi akan diserahkan kepada para pengolah data.

Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Lazimnya editing dilakukan terhadap kuesioner-kuesioner yang disusun terstruktur dan pengisiannya melalui wawancara formal.³²

1.9.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-sub bab mulai dari Bab I sampai dengan Bab IV, yaitu sebagai berikut :

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986, hal. 127.

³⁰ Bambang Sunggono, *Op.cit*, hal. 112

³¹ *Ibid*, hal. 118.

³² *Ibid*, hal. 126.

Bab Pertama yaitu berisi PENDAHULUAN, sebagai pengantar awal yang menguraikan gambaran umum mengenai keseluruhan penulisan ini. Berisi beberapa Sub bab. Sub bab Pertama Latar belakang permasalahan berisi tentang pengetahuan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba secara luas. Sub bab kedua menjelaskan Rumusan masalah. Sub bab ketiga merupakan Tujuan penelitian. Sub bab keempat menerangkan tentang Manfaat penelitian adalah menerangkan tentang manfaat dalam penelitian yang dapat membantu bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang penelitian yang di tulis oleh penulis. Sub bab kelima merupakan Kajian pustaka. Sub bab Keenam Metode penelitian adalah jenis metode yang di gunakan oleh penulis dalam membuat penelitian yang di landasi tentang dasar teori yang dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah dengan penelitian yuridis empiris dengan cara menarik asas hukum positif.

Bab Kedua membahas tentang dasar kewenangan BNNP Jawa Timur sebagai penyelidik dan penyidikan penyalahgunaan narkoba. Dari pokok bahasan tersebut dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama tentang dasar Hukum BNNP Jawa Timur sebagai penyelidik dan penyidikan Tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan sub bab yang kedua tentang Satker BNNP Jawa Timur yang Khusus menangani tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Bab Ketiga PEMBAHASAN pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan narkotika oleh BNNP Jawa Timur. Dari rumusan masalah tersebut dibagi menjadi dua sub bab , sub bab yang pertama tentang prosedur penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika BNNP Jawa Timur dan sub bab yang kedua tentang analisis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika BNNP Jawa Timur.

Bab keempat yaitu berisi PENUTUP yang berisi kritik dan saran dari penulis mengenai kesimpulan dari pokok permasalahan yang dibahas dan terdapat beberapa saran untuk dapat dipergunakan sebagai referensi bagi, pihak-pihak yang berkompeten.